



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)

KECAMATAN BALONGPANGGANG 2025

PEMERINTAHAN KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BALONGPANGGANG

*Jl. Raya Kedungpring No. 190
kec.balongpanggang2@gmail.com*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Pt. CAMAT BALONGPANGGANG



MERISTA DEDY HARTADI, S.STP., M.Si
NIP. 19800507 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Maksud dan Tujuan	11
1.3 Gambaran Umum Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik	11
1.3.1 Kedudukan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik	11
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.....	13
1.3.3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah	14
1.3.4 Bagan Struktur Organisasi Kec, Balongpanggang.....	14
1.3.5 Personil/Pegawai	15
1.4 Isu Strategis.....	16
1.5 Sistematika Penyusunan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	19
2.2 Perjanjian Kinerja.....	24
2.3 Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik	35
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	36
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	36
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	37
3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana	39
3.1.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata – Rata Capaian Nasional / Prov. Jatim / Kab. Kota Lain.....	40
3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	41
3.4 Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	43
3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	47

BAB IV PENUTUP	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Balongpanggang	15
Tabel 2. 1 Sasaran Kecamatan Balongpanggang Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021 – 2026	19
Tabel 2. 2 Sasaran Kecamatan Balongpanggang Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025 - 2029.....	20
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Balongpanggang APBD Tahun 2025.....	24
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Balongpanggang PAPBD Tahun 2025	24
Tabel 2. 5 Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Peta Wilayah Kecamatan Balongpanggang	12
Gambar 1 2 Struktur Organisasi Kecamatan Balongpanggang	15

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2021- 2026 Dan Renstra Tahun 2025 -2029. Capaian kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 Dalam mewujudkan tujuan (Renstra Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik 2021-2025)

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi” dapat di gambarkan sebagai berikut :

- Sasaran yang di ukur dalam Mewujudkan tujuan Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan Pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sedangkan Capaian Kinerja Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025 Dalam mewujudkan tujuan Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025 - 2029 **“Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas”** Sasaran yang diukur adalah “
 1. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 2. Meningkatkan keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa dengan indikator
 - Rasio Pendanaan Pendidikan di Pedesaan
 - Rasio Pendanaan Kesehatan di Pedesaan
 - Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Pedesaan
 - Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan
 - Rasio Belanja Infrastruktur Desa
 - Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana di Desa
- Program yang mendukung sasaran demi mewujudkan tujuan Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Kecamatan Balongpanggang 2025 – 2029 antara lain :
 - 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Target Capaian Indikator IKM adalah 98 % dengan realisasi 98,96 % sehingga capaian kinerja sebesar 100.98 % atau bermakna sangat baik sekali
 - Target Capaian dengan Indikator
 1. Rasio pendanaan pendidikan di pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali
 2. Rasio pendanaan kesehatan di pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali
 3. Rasio pendanaan perlindungan anak di pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali
 4. Rasio pendanaan pemberdayaan Perempuan di kawasan pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali
 5. Rasio belanja Infrastruktur adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali
 6. Rasio Pembiayaan penanggulangan bencana di desa adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali
 - Realisasi anggaran Kecamatan Balongpanggang mencapai 85,94 % dengan pagu anggaran Rp 4.354.017.204,70 dan realisasi anggaran Rp 3.741.638.457,67 dengan efisiensi sebesar 14,06 %
 - Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, sebagaimana analisis pencapaian indikator sasaran disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Balongpanggang tahun 2025 adalah Sangat Baik
 - Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 didukung dengan adanya kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan, para pemangku kepentingan baik di Pemerintahan Kecamatan Balongpanggang, maupun pemerintah daerah serta dukungan/ partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan. Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut

diatas, ada beberapa tantangan/hambatan yang perlu mendapat perhatian/solusi, yaitu antara lain :

A. Tantangan / hambatan:

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) antara jumlah aparatur dengan beban kerja;
- Keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan (ruang layanan, perangkat IT, jaringan internet);
- Kebutuhan modernisasi sistem pelayanan berbasis elektronik yang belum sepenuhnya optimal;
- Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi dan layanan publik;
- Perubahan regulasi yang cepat dari pemerintah pusat maupun daerah menuntut penyesuaian administrasi dan prosedur kerja;
- Keinginan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang lebih prima;
- Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap prosedur pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Balongpanggang;
- Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja melayani;
- Tidak semua ASN Kecamatan Balongpanggang peduli akan Capaian Kinerja; dan
- Infrastruktur pendukung pelayanan di beberapa wilayah belum merata.

B. Solusi:

- Membangun system pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan;
- Mendorong peningkatan kapasitas perangkat desa melalui bimtek dan pendampingan rutin;
- Pengembangan layanan administrasi berbasis digital;
- Sosialisasi dan internalisasi regulasi baru secara berkala;
- Peningkatan sosialisasi program pembangunan secara terbuka;
- Penetapan indikator kinerja yang lebih terukur dan realistis;
- Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat; dan
- Evaluasi triwulanan terhadap realisasi program dan anggaran.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan good governance dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggung jawabkan, sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik pada Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang; dan
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggung jawabkan).

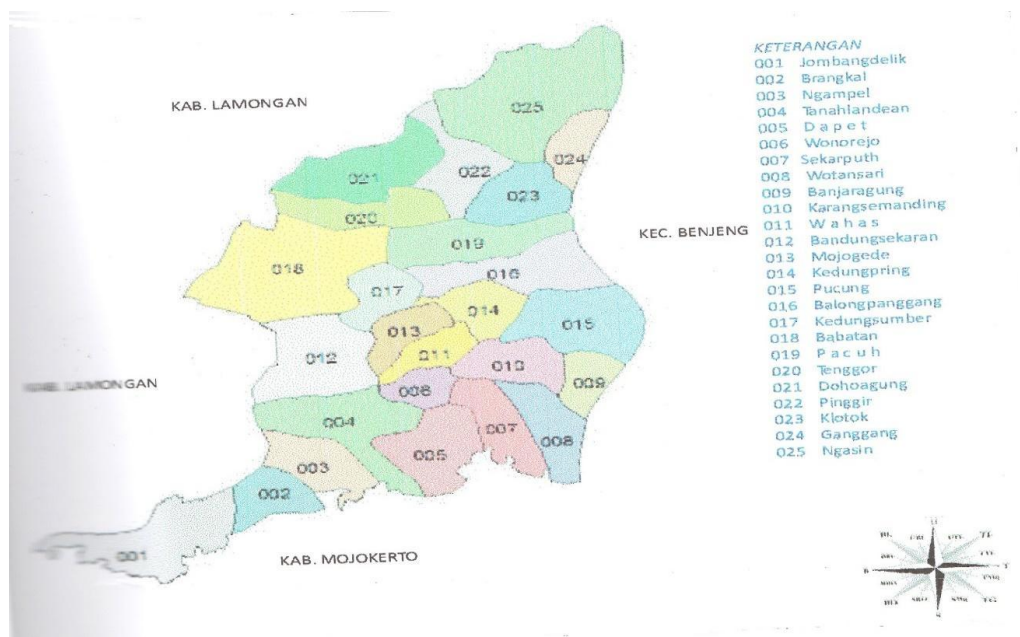
1.3 Gambaran Umum Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

1.3.1 Kedudukan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Kedudukan Kecamatan Balongpanggang sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun

2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Balongpanggang. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik adalah :

“ Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.”



Gambar 1 1 Peta Wilayah Kecamatan Balongpanggang

Wilayah Pemerintahan Desa di Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 Desa, sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Jombangdelik | 14. Kedungpring |
| 2. Brangkal | 15. Pucung |
| 3. Ngampel | 16. Balongpanggang |
| 4. Tanahlandean | 17. Kedungsumber |
| 5. Dapet | 18. Babatan |
| 6. Wonorejo | 19. Pacuh |
| 7. Sekarputih | 20. Tenggor |
| 8. Wotansari | 21. Dohoagung |
| 9. Banjaragung | 22. Pinggir |
| 10. Karangsemanding | 23. Klotok |
| 11. Wahas | 24. Ganggang |

- 12. Bandungsekaran
- 13. Mojogede

25. Ngasin

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan /atau kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;

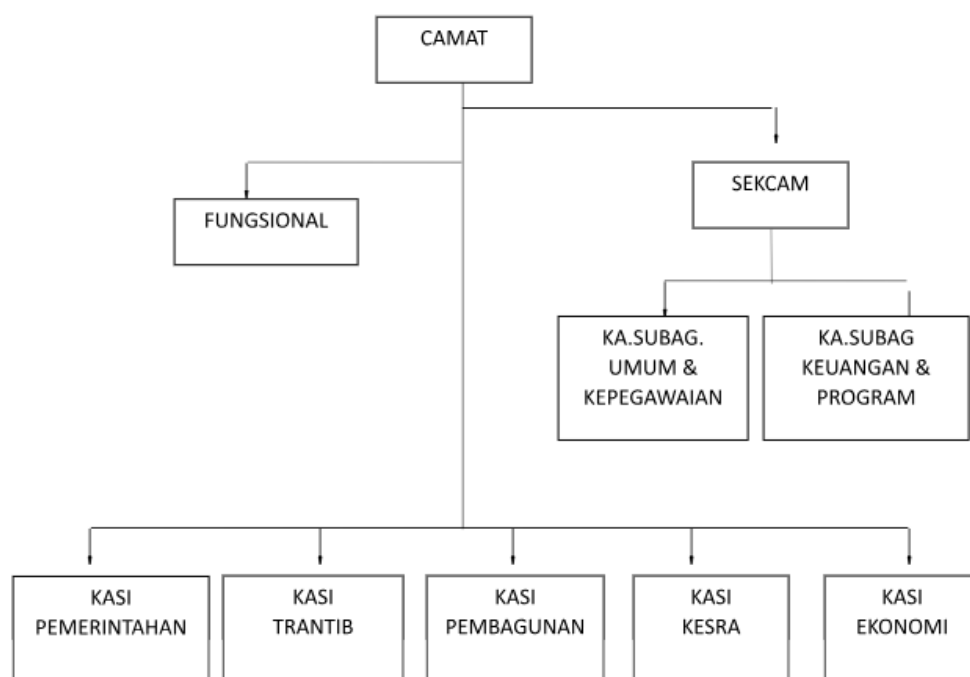
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 7) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- 8) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- 9) Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- 10) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- 11) Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerja kecamatan;
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik terdiri dari:

- Camat
- Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pembangunan
- Seksi Ekonomi
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.4 Bagan Struktur Organisasi Kec, Balongpanggang (Perda No. 02 Th. 2013)



Gambar 1 2 Struktur Organisasi Kecamatan Balongpanggang

1.3.5 Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 27 orang dan tenaga honorer (THL) sebanyak 8 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 35 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Balongpanggang

No.	Uraian	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Kecamatan	1
3	Seksi Pemerintahan	4
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6
5	Seksi Pembangunan	4
6	Seksi Kesra	3
7	Seksi Ekonomi	2
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6

9	Sub Bagian Keuangan dan Program	4
JUMLAH		31

1.4 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu - isu strategis yang dihadapi Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik antara lain :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Balongpanggang pada tahun 2023 mencapai nilai tinggi sebesar 97,42%, mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Kemudian pada tahun 2024 nilai IKM mengalami kenaikan menjadi 99%, yang menunjukkan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan. Akan tetapi pada Tahun 2025 Nilai IKM Kecamatan Balongpanggang mengalami sedikit penurunan sebesar 98,96%;
- Rasio pendanaan pendidikan di pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali;
- Rasio pendanaan kesehatan di pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali;
- Rasio pendanaan pemberdayaan Perempuan di kawasan pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali;
- Rasio belanja Infrastruktur adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali;
- Rasio pendanaan perlindungan anak di pedesaan adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali;
- Rasio Pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa adalah 1:1 dengan realisasi 1:1 sehingga capaian kinerja 100% bermakna baik sekali

Oleh karena itu dengan isu-isu strategi tersebut, Kecamatan Balongpanggang beradaptasi dan berinovasi dalam pendekatan tata kelola pemerintahan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa tindakan strategis perlu diimplementasikan antara lain :

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur kecamatan melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi langkah awal yang krusial;

- Pengimplementasian sistem manajemen kinerja yang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan public;
- Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait akan memastikan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke desa-desa terhadap pelaksanaan APBDES, guna memastikan pencapaian target baik pendanaan maupun pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kualitas pelayanan public yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Balongpanggang. Selain itu, diharapkan pula adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah di kecamatan ini. Melalui sistem manajemen kinerja yang berbasis teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan layanan publik juga diharapkan dapat meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra dan Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun Anggaran 2025, Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan sasaran Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN

Berisi data – data lainnya sebagai pendukung.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda refocusing. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Meskipun demikian, Kecamatan Balongpanggang tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Sesuai dengan Cascading kinerja Kecamatan Balongpanggang mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah RPJMD Tahun 2021-2026, terkait hal tersebut Kecamatan Cerme menetapkan 1 (satu) tujuan antara lain :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun sasaran Kecamatan Balongpanggang Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Sasaran Kecamatan Balongpanggang Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan	75%	80%	85%	97,42%	98%	98,96%

	publik di kecamatan						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Sesuai RPJMD Tahun 2025 – 2029 Terkait hal tersebut Kecamatan Balongpanggang menetapkan tujuan terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik; dan
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa.

Adapun sasaran Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Sasaran Kecamatan Balongpanggang Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025 - 2029

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	98 %	98,96 %	98,50 %	98,75 %	99 %	100 %
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1
	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1
	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1

	Rasio belanja infrastruktur desa	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1
	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1

Dalam menunjang tujuan dan sasaran yang akan di capai, Kecamatan Balongpanggang memiliki 6 program dan 13 kegiatan sebagaimana berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administasi umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Dearah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuanagan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	APBD (Rp.)	PAPBD (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rerata Persentase Capaian	100 %	4.710.657.290,41	4.106.740.704,70

Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja Program (%)			
Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Pelayanan Publik Kecamatan yan Terfasilitasi (%)	100 %	15.571.100	12.371.100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/keluraha n yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	96.062.800	108.220.200
	Persentase desa/kelurah an yang melaksana n program prioritas bidang kesehatan (%)	100 %		
	Persentase desa/keluraha yang melaksanakan program prioritas bidang pemberdayaan Perempuan (%)	100 %		
	Persentase desa/kelurah an yang melaksana n program prioritas bidang	100 %		

	Penanggulan gan Bencana Oleh Desa (%)			
	Persentase desa/kelurah an yang melaksana n program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %		
	Persentase desa/kelurah an yang melaksana n program prioritas bidang perlindungan anak (%)	100 %		
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %		
	Persentase Lembaga Kemasyaraka tan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	42.446.400	68.046.400

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100 %	3.346.400	32.852.400
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase APBDes yang ditetapkan Tepat Waktu (%)	100 %	3.346.400	25.786.400

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Balongpanggang APBD Tahun 2025

Renstra	Indikator	Target
		2025
1	2	3
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di kecamatan	98%

b. Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Balongpanggang PAPBD Tahun 2025

Renstra	Indikator	Target
		2025
1	2	3
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di kecamatan	98%
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1 – 1

	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1 – 1
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1 – 1
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Pedesaan	1 – 1
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1 – 1
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1 – 1

2.3 Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2. 5 Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan	Belanja	Hasil/Keluaran	
	Anggaran	Rencana	Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.000,00	5	Dokumen
Indikator Kinerja 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	280.000,00	5	Dokumen
Indikator Kinerja 1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	280.000,00	5	Dokumen
Indikator Kinerja 1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	280.000,00	5	Dokumen
Indikator Kinerja 1 Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	280.000,00	5	Dokumen
Indikator Kinerja 1 Jumlah Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	280.000,00	5	Laporan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.614.564.555,39	30	Orang/ bulan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	445.000,00	5	Laporan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.990.700,00	10	Paket

Indikator Kinerja 1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.015.000,00	1500	Paket
Indikator Kinerja 1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.129.049,31	3	Paket
Indikator Kinerja 1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.324.100,00	2	Dokumen
Indikator Kinerja 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.330.000,00	222	Laporan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.562.400,00	2	Dokumen
Indikator Kinerja 1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.453.200,00	3	Laporan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.665.300,00	3	Laporan

Indikator Kinerja 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.496.000,00	8	Laporan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.385.400,00	3	Unit
Indikator Kinerja 1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000,00	5	Unit

Indikator Kinerja 1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.700.000,00	60	Unit
Indikator Kinerja 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.371.100,00	2	Laporan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29.546.400,00	25	Lembaga Kemasyar akatan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	31.697.400,00	3	Lembaga Kemasyar akatan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	19.940.000,00	2	Lembaga Kemasyar akatan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			

Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	27.036.400,00	25	Laporan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	68.046.400,00	12	Laporan
Indikator Kinerja 1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	32.852.400,00	25	Orang
Indikator Kinerja 1 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.786.400,00	25	Dokumen
Indikator Kinerja 1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember			
Indikator Kinerja 2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan			

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Balongpanggang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 yang dibandingkan dengan target perjanjian kinerja berdasarkan Renstra 2021 – 2025. Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

a. Untuk Renstra 2021 – 2026

Tabel 3. 2 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja untuk RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Kategori
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan (Indikator : IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	98 %	98,96 %	100,98 %	Peningkatan

b. Untuk Renstra 2025 – 2029

Tabel 3. 3 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja untuk RENSTRA Tahun 2025 - 2029

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Kategori
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	98 %	98,96 %	100,98 %	Peningkatan
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1-1	1-1	100%	Sesuai

	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1-1	1-1	100%	Sesuai
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1-1	1-1	100%	Sesuai
	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1-1	1-1	100%	Sesuai
	Rasio belanja infrastruktur desa	1-1	1-1	100%	Sesuai
	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1-1	1-1	100%	Sesuai

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

a. Untuk Renstra 2021 – 2026

Tabel 3. 4 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya untuk RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi					Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan (Indikator : IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	97 %	96,1 %	97,42 %	99 %	98,96 %	Penurunan

b. Untuk Renstra 2025 – 2029

Tabel 3. 5 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya untuk RENSTRA Tahun 2025 - 2029

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Kategori
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	98 %	98,96 %	Sesuai Target
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1-1	1-1	Sesuai Target
	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1-1	1-1	Sesuai Target
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1-1	1-1	Sesuai Target
	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1-1	1-1	Sesuai Target
	Rasio belanja infrastruktur desa	1-1	1-1	Sesuai Target
	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1-1	1-1	Sesuai Target

3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana

a. Untuk Renstra 2021 – 2026

Tabel 3. 6 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA untuk RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2025	Keterangan
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan (Indikator : IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	98,96 %	98,96 %	Sama Dengan

b. Untuk Renstra 2025 – 2029

Tabel 3. 7 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RENSTRA untuk RENSTRA Tahun 2025 - 2029

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2029	Realisasi 2025	Keterangan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	99 %	98,96 %	Peningkatan
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1-1	1-1	Sesuai Target
	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1-1	1-1	Sesuai Target
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1-1	1-1	Sesuai Target

	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1-1	1-1	Sesuai Target
	Rasio belanja infrastruktur desa	1-1	1-1	Sesuai Target
	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1-1	1-1	Sesuai Target

3.1.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata – Rata Capaian Nasional / Prov. Jatim / Kab. Kota Lain

a. Untuk 2021 – 2026

Tabel 3. 8 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Rata - Rata Capaian Nasional/Prov. Jatim/Kab.Lain Untuk RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Nasional / Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Perangkat Daerah	Lebih Rendah / Lebih Tinggi
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan (Indikator : IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Kabupaten Lamongan	Dinas Kesehatan	Lebih Tinggi

b. Untuk 2025 – 2029

Tabel 3. 9 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Rata - Rata Capaian Nasional/Prov. Jatim/Kab.Lain Untuk RENSTRA Tahun 2025 - 2029

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Nasional / Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Perangkat Daerah	Lebih Rendah / Lebih Tinggi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Kabupaten Lamongan	KPU	Lebih Rendah

Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan			
	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan			
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan			
	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan			
	Rasio belanja infrastruktur desa			
	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa			

3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Keberhasilan : - Digitalisasi layanan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai	- Memperluas penggunaan system pengawasan digital dan membangun zona integritas di seluruh unit kerja

		dengan SOP yang berlaku Kegagalan : - Kurang optimalnya kualitas SDM ASN dalam mengoperasikan system digital dan teknologi informasi terbaru	- Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM ASN
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Keberhasilan : - Melaksanakan perencanaan di bidang pendidikan hingga pelaksanaan APBDes dengan baik	- Melaksanakan bimtek dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa - Melaksanakan monev secara rutin ke desa-desa
	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	Keberhasilan : - Melaksanakan perencanaan di bidang kesehatan hingga pelaksanaan APBDes dengan baik	- Melaksanakan bimtek dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa - Melaksanakan monev secara rutin ke desa-desa
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Keberhasilan : - Melaksanakan perencanaan dibidang perlindungan anak hingga pelaksanaan APBDes dengan baik	- Melaksanakan bimtek dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa - Melaksanakan monev secara rutin ke desa-desa

	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	Keberhasilan : - Melaksanakan perencanaan dibidang perlindungan perempuan hingga pelaksanaan APBDes dengan baik	- Melaksanakan bimtek dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa - Melaksanakan monev secara rutin ke desa-desa
	Rasio belanja infrastruktur desa	Keberhasilan : - Melaksanakan perencanaan dibidang infrastruktur hingga pelaksanaan APBDes dengan baik	- Melaksanakan bimtek dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa - Melaksanakan monev secara rutin ke desa-desa
	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	Keberhasilan : - Melaksanakan perencanaan dibidang penanggulangan bencana hingga pelaksanaan APBDes dengan baik	- Melaksanakan bimtek dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa - Melaksanakan monev secara rutin ke desa-desa

3.4 Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dalam mencapai sasaran strategis, yang telah ditargetkan dalam Renstra. Adapun sumber daya yang dimiliki Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk mencapai target sasaran strategis, adalah SDM Aparatur (Tenaga ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik), Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Berikut merupakan indikator kinerja utama, target keuangan, realisasi keuangan, dan capaian kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya.

a. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	98 %	98,96 %	100,98 %	4.133.777.104,70	3.554.700.307,67	86,00 %
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1 – 1	1 – 1	100 %	21.122.450,00	17.208.400,00	81,47 %
	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1 – 1	1 – 1	100 %	21.122.450,00	17.208.400,00	81,47 %
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1 – 1	1 – 1	100 %	21.122.450,00	17.208.400,00	81,47 %

	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1 – 1	1 – 1	100 %	21.122.450,00	17.208.400,00	81,47 %
	Rasio belanja infrastruktur desa	1 – 1	1 – 1	100 %	55.332.800,00	41.032.800,00	74,16 %
	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1 – 1	1 – 1	100 %	68.046.400,00	64.736.400,00	95,14 %

b. Efisiensi Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025

Tabel 3. 12 Efisiensi Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran			Capaian Kinerja x Pagu Anggaran	Hasil Capaian Kinerja x Pagu Anggaran Realisasi
			Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	100,98 %	4.119.111.804,70	3.551.379.257,67	86,22 %	4.159.479.100	608.099.842,33

Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	100 %	35.268.150,00	26.371.600,00	59,82 %	26.371.600,00	8.896.550,00
	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	100 %	35.268.150,00	26.371.600,00	59,82 %	26.371.600,00	8.896.550,00
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	100 %	35.268.150,00	26.371.600,00	59,82 %	26.371.600,00	8.896.550,00
	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	100 %	35.268.150,00	26.371.600,00	59,82 %	26.371.600,00	8.896.550,00

	Rasio belanja infrastruktur desa	100 %	25.786.400,00	20.036.400	77,70 %	25.786.400,00	5.750.000,00
	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	100 %	68.046.400,00	64.736.400,00	95,14 %	68.046.400,00	3.310.000,00
(Q) Jumlah			4.354.017.204,70	3.741.638.457,67	-	4.358.798300,00	652.746.042,33
R) Efisiensi % K/F			14,06 %				

3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Publik Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Adapun analisis keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Penunjang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	Rasio belanja infrastruktur desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik selama Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongpanggang 2025 - 2029 dapat dilihat hasil capaian kinerja sebesar 100,98 % dengan kategori “SANGAT BAIK” dan capaian anggaran sebesar 85,94 % dengan kategori “BAIK”.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.354.017.204,70 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 3.741.638.457,67 atau 85,94 %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2025 Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program

yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

SARAN

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi serta membuat kebijakan yang efektif dalam program pembangunan pemulihan ekonomi
2. Melakukan Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Balongpanggang, 31 Januari 2026

~~PIH. CAMAT BALONGPANGGANG~~



MERISTA DEBY HARTADI, S.STP., M.Si

NIP. 19800507 200012 1 001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURYO WIBOWO, S.Sos., M.Si

Jabatan : CAMAT BALONGPANGGANG

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

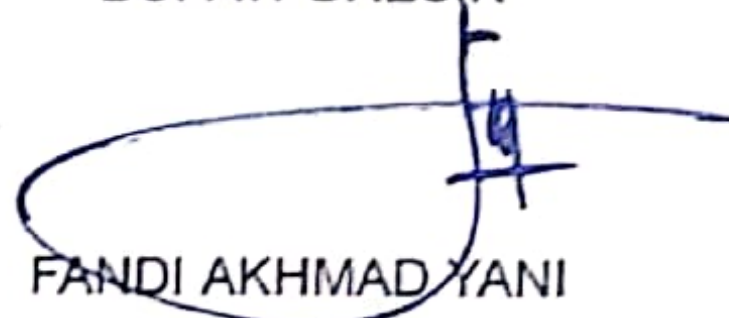
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

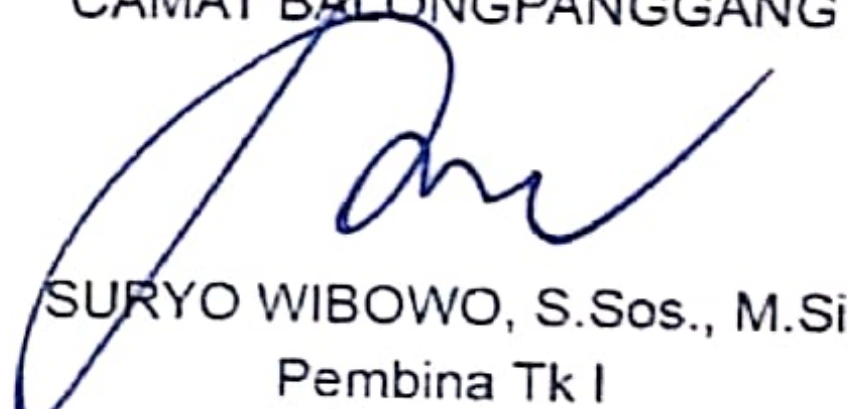
PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK



FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
CAMAT BALONGPANGGANG



SURYO WIBOWO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670501 198603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan (Indikator : IKM)	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	98 %

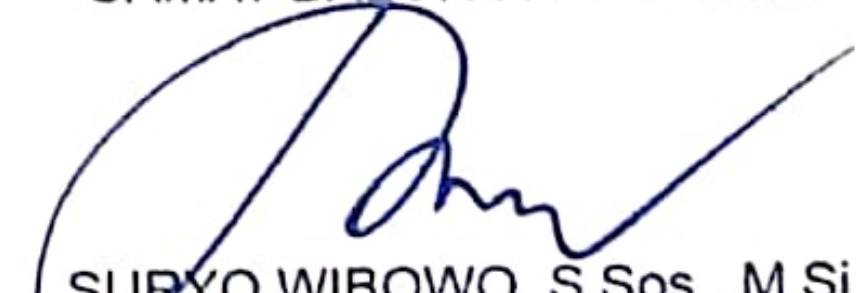
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,710,657,290.41	APBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 15,571,100.00	APBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 96,062,800.00	APBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 42,446,400.00	APBD
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 3,346,400.00	APBD
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 3,346,400.00	APBD
Jumlah			Rp. 4,871,430,390.41	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDLAKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
CAMAT BALONGPANGGANG


SURYO WIBOWO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670501 198603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR SALIM, SH., MM.

Jabatan : Plt. Camat Balongpanggang

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 1 Januari 2025

PIHAK KESATU

NUR SALIM, SH.,MM.

Pembina

NIP. 19710814 199203 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN GRESIK**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan ditingkat desa	1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1 RASIO
2	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan di Tingkat Desa / Kelurahan	1	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1:1 RASIO
3	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	1	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1 RASIO
4	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan	1	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1:1 RASIO
5	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa	1	Rasio belanja infrastruktur desa	1:1 RASIO
6	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana ditingkat desa	1	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1:1 RASIO
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1:1 RASIO

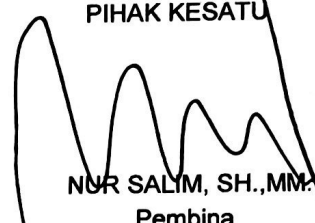
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,128,340,704.70	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 12,371,100.00	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 108,220,200.00	PAPBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 46,446,400.00	PAPBD
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 32,852,400.00	PAPBD

6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 25,786,400.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 4,354,017,204.70	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 1 Januari 2025
PIHAK KESATU


NUR SALIM, SH.,MM.
Pembina
NIP. 19710814 199203 1 003



PEREODE TAHUN 2021 - 2026

[illegible]

															Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
											7	1	1	2	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD			10 buku	999.975	10 buku	1.421.805	5 Dokumen	3.000.000	5 dokumen	1.000.000	5 dokumen	2.000.000	5 dokumen	2.500.000	SEKRETARIAT	
															Tersusunnya Jumlah Dokumen DPA OPD																	
															Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																
											7	1	1	2	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD			10 buku	999.875	10 buku	1.421.805	5 Dokumen	3.000.000	5 dokumen	1.000.000	5 dokumen	2.000.000	5 dokumen	2.500.000	SEKRETARIAT	
															Jumlah Dokumen Perubahan DPA OPD																	
															Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																
											7	1	1	2	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 buku	6.000.000	5 buku	1.421.805	5 Dokumen	3.000.000	5 dokumen	1.000.000	5 dokumen	2.000.000	5 dokumen	2.500.000	SEKRETARIAT	
															Jumlah Dokumen Capaian Kinerja OPD																	
															Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
															Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			2 kali	1.000.000													
															Jumalh Evaluasi																	
											7	1	1	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2 kegiatan	3.391.073.820	2 kegiatan	3.441.887.730	2 kegiatan	5.004.000.000	2 kegiatan	4.001.000.000	2 kegiatan	3.688.640.000	2 kegiatan	3.689.140.000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

													Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
										7	1	1	2	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya		11 jenis	44.360.000	11 jenis	6.080.000	60 Unit	55.000.000	60 Unit	20.000.000	60 Unit	60.000.000	60 Unit	60.000.000	SEKRETARIAT	
													jumlah Sarana dan prasarana kantor yang dipelihara																	
													Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
										7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		75%	18.096.000	80%	14.616.000	85%	19.485.000	90%	45.000.000	95%	26.670.000	99%	28.381.000		
													Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi melandai Barmengpan RB	100%															
										7	1	2	2	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Nilai survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di		75	18.096.000	80	18.700.000	85	25.000.000	90	45.000.000	95	30.000.000	99	30.000.000		
										7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		2 kegiatan	18.096.000	2 kegiatan	18.700.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	45.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	PEMERINTAHAN	
													Jumlah Kegiatan SKJ dan Partisipasi Gerak jalan Tk. Kecamatan serta Tersedianya Ruang Ramah Anak																	
													Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada																
										7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		75%	37.995.000	80%	136.780.000	85%	241.605.000	90%	350.000.000	95%	293.370.000	99%	316.920.000		
													Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pelaksanaan x koordinasi Jumlah Desa sekecamatan 100 %	100%															
										7	1	3	2	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		25 desa	#REF!	25 desa	15.000.000	25 desa	35.000.000	25 desa	15.000.000	25 desa	380.000.000	25 desa	405.000.000		

[illegible]

[illegible]

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BALONGPANGGANG TAHUN 2025 - 2029

				APBD 2025				2026				2027				2028				2029				2030				INDIKATOR INMEN 2 2025
Kode	Outcome Program	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Rp (Usulan)	Target Kinerja	Rp	Rp (Usulan)	Target Kinerja	Rp	Rp (Usulan)	Target Kinerja	Rp	Rp (Usulan)	Target Kinerja	Rp	Rp (Usulan)	Target Kinerja	Rp	Rp (Usulan)					
2		KECAMATAN BALONGPANGGANG		5		5		6																				
7		UNSUR KEWILAYAHAN																										
7 01		KECAMATAN		100	4.871.430.390,41	100	4.894.397.421,00	4.894.397.421,00	5.367.240.322,00	100	5.041.613.332,00	5.108.765.210,20	100	5.224.748.381,00	5.503.991.731,22	100	5.488.593.199,00	5.488.593.199,00	5.758.990.904,34	100	5.656.153.166,00	7.872.289.994,78						
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	4.710.457.290,41	100	4.734.800.520,00	5.184.931.072,00	5.184.931.072,00	100	4.875.223.640,00	5.703.424.179,20	100	5.054.248.627,00	6.273.764.597,12	100	5.307.451.712,00	6.901.143.256,83	100	5.449.481.652,00	7.591.257.582,52	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah						
7 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	2.970.000,00	100	3.120.000,00	3.432.000,00	3.432.000,00	100	3.720.000,00	3.775.200,00	100	4.020.000,00	4.152.720,00	100	4.920.000,00	4.567.992,00	100	13.800.000,00	5.024.791,20							
7 01 01 2.01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	495.000,00	5	520.000,00	572.000,00	572.000,00	5	620.000,00	629.200,00	5	670.000,00	692.120,00	5	820.000,00	761.332,00	5	920.000,00	837.445,20	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
7 01 01 2.01 0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	495.000,00	5	520.000,00	572.000,00	572.000,00	5	620.000,00	629.200,00	5	670.000,00	692.120,00	5	820.000,00	761.332,00	5	9.200.000,00	837.445,20	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
7 01 01 2.01 0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	495.000,00	5	520.000,00	572.000,00	572.000,00	5	620.000,00	629.200,00	5	670.000,00	692.120,00	5	820.000,00	761.332,00	5	920.000,00	837.445,20	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
7 01 01 2.01 0004		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	495.000,00	5	520.000,00	572.000,00	572.000,00	5	620.000,00	629.200,00	5	670.000,00	692.120,00	5	820.000,00	761.332,00	5	920.000,00	837.445,20	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						
7 01 01 2.01 0005		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	495.000,00	5	520.000,00	572.000,00	572.000,00	5	620.000,00	629.200,00	5	670.000,00	692.120,00	5	820.000,00	761.332,00	5	920.000,00	837.445,20	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
7 01 01 2.01 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	495.000,00	5	520.000,00	572.000,00	572.000,00	5	620.000,00	629.200,00	5	670.000,00	692.120,00	5	820.000,00	761.332,00	5	920.000,00	837.445,20	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
7 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	6.191.548.889,41	100	6.191.548.889,00	6.430.735.777,90	6.430.735.777,90	100	6.152.197.749,00	6.091.798.355,48	100	6.497.977.216,00	6.578.916.181,24	100	6.579.451.521,00	6.114.876.010,18	100	6.876.416.941,00	6.760.563.647,67							
7 01 01 2.02 0001		Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	4.190.893.889,41	30	4.190.893.889,00	4.609.983.277,90	4.609.983.277,90	30	4.323.457.249,00	5.070.981.605,69	30	4.492.202.236,00	5.578.079.766,24	30	4.728.531.321,00	6.135.887.742,88	30	4.873.395.261,00	6.749.476.517,17	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
7 01 01 2.02 0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	620.000,00	5	675.000,00	742.500,00	742.500,00	5	720.000,00	816.750,00	5	770.000,00	898.425,00	5	920.000,00	988.267,50	5	1.020.000,00	1.087.094,25	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	110.356.000,00	100	116.896.031,00	130.787.836,16	130.787.836,16	100	123.184.491,00	143.866.617,51	100	129.504.491,00	158.253.279,24	100	141.493.891,00	174.078.607,19	100	146.354.491,00	191.684.647,91							
7 01 01 2.06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	17.460.100,00	8	19.841.000,00	21.825.100,00	21.825.100,00	8	20.635.400,00	24.007.610,00	8	21.385.400,00	26.408.371,00	8	22.135.400,00	29.049.208,10	8	22.885.400,00	31.954.128,91	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
7 01 01 2.06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	24.990.000,00	12	25.050.000,00	27.555.000,00	27.555.000,00	12	25.500.000,00	30.310.500,00	12	26.250.000,00	33.341.550,00	12	26.400.000,00	36.675.705,00	12	27.000.000,00	40.343.275,50	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
7 01 01 2.06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	7.697.301,00	3	9.868.757,00	10.855.632,70	10.855.632,70	3	10.199.691,00	11.941.195,97	3	10.949.691,00	13.135.315,57	3	11.739.091,00	14.448.847,12	3	12.449.691,00	15.893.731,84	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
7 01 01 2.06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	8.324.100,00	24	8.708.274,00	9.579.101,40	9.579.101,40	24	9.099.400,00	10.537.011,54	24	9.849.400,00	11.590.712,69	24	10.599.400,00	12.749.783,76	24	11.349.400,00	14.024.742,34	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
7 01 01 2.06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	38.830.000,00	12	40.430.000,00	44.473.000,00	44.473.000,00	12	40.750.000,00	48.920.300,00	12	41.070.000,00	53.812.330,00	12	41.870.000,00	59.193.563,00	12	42.670.000,00	65.112.919,30	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
7 01 01 2.06 0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	13.052.500,00	4	15.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	4	17.000.000,00	18.150.000,00	4	20.000.000,00	19.965.000,00	4	28.750.000,00	21.961.500,00	4	30.000.000,00	24.157.650,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	325.734.000,00	100	334.298.200,00	344.378.520,00	344.378.520,00	100	335.504.500,00	378.816.372,00	100	337.006.500,00	414.498.009,20	100	338.504.500,00	458.367.810,12	100	340.004.500,00	504.204.591,13							
7 01 01 2.08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	85.453.200,00	3	88.453.200,00	97.296.520,00	97.296.520,00	3	88.783.200,00	107.028.372,00	3	89.533.200,00	117.731.209,20	3	90.283.200,00	129.504.330,12	3	91.033.200,00	142.454.763,13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
7 01 01 2.08 0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	9.784.800,00	2	12.350.000,00	13.585.000,00	13.585.000,00	2	13.228.300,00	14.943.500,00	2	13.978.300,00	16.437.850,00	2	14.728.300,00	18.081.635,00	2	15.478.300,00	19.889.798,50	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
7 01 01 2.08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	236.496.000,00	8	233.495.000,00	233.495.000,00	233.495.000,00	8	233.495.000,00	256.844.500,00	8	233.495.000,00	282.528.950,00	8	233.495.000,00	310.781.845,00	8	233.495.000,00	341.840.029,50	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
7 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	80.085.400,00	100	84.915.400,00	95.604.940,00	95.604.940,00	100	88.635.400,00	105.167.634,00	100	90.745.400,00	115.684.397,40	100	93.080.000,00	127.252.837,14	100	94.905.400,00	139.978.120,85							
7 01 01 2.09 0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	70.385.400,00	3	72.385.400,00	79.623.940,00	79.623.940,00	3	72.885.400,00	87.584.334,00	3	73.635.400,00	96.344.967,40	3	75.000.000,00	105.979.444,14	3	75.135.400,00	116.577.410,55	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
7 01 01 2.09 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	3.000.000,00	4	6.900.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	4	7.000.000,00	7.865.000,00	4	7.750.000,00	8.651.500,00	4	8.000.000,00	9.516.650,00	4	8.250.000,00	10.448.315,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
7 01 01 2.09 11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi	45	6.700.000,00	45	8.030.000,00	8.833.000,00	8.833.000,00	45	8.750.000,00	9.716.300,00	45	9.360.000,00	10.487.930,00	45	10.080.000,00	11.756.723,00	45	11.520.000,00	12.932.395,30	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi						
7 01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	15.571.100,00	100	15.650.904,00	17.128.210,00	17.128.210,00	100	16.115.075,00	18.841.031,00	100	16.706.843,00	20.725.134,10	100	17.543.807,00	22.797.447,51	100	18.079.398,00	25.077.412,24							

	Kode	Outcome Program	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Rp (Usulan)	Target Kinerja	Rp	Rp (Usulan)	Target Kinerja	Rp	Rp (Usulan)	Target Kinerja	Rp	Rp (Usulan)	Target Kinerja	Rp	Rp (Usulan)	INDIKATOR INHMEN 2 2025
2			3	4			5	6	6													
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	15.571.100,00	100	15.450.906,00	17.128.210,00	100	16.115.075,00	18.841.031,00	100	16.706.843,00	20.725.134,10	100	17.543.807,00	22.797.647,51	100	18.079.398,00	25.077.412,24	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	15.571.100,00	12	15.450.906,00	17.128.210,00	12	16.115.075,00	18.841.031,00	12	16.706.843,00	20.725.134,10	12	17.543.807,00	22.797.647,51	12	18.079.398,00	25.077.412,24	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	96.042.800,00	100	96.555.145,00	110.500.000,00	100	99.418.744,00	120.500.000,00	100	103.049.539,00	134.500.000,00	100	108.233.022,00	150.550.000,00	100	111.537.242,00	164.405.000,00	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	15.994.400,00	100	15.450.906,00	16.500.000,00	100	16.050.906,00	17.500.000,00	100	16.916.076,00	20.000.000,00	100	17.724.482,00	22.000.000,00	100	19.134.258,00	24.200.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25	15.596.400,00	25	15.450.906,00	16.500.000,00	25	16.050.906,00	17.500.000,00	25	16.916.076,00	20.000.000,00	25	17.724.482,00	22.000.000,00	25	19.134.258,00	24.200.000,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	80.444.400,00	100	80.904.239,00	94.000.000,00	100	83.347.838,00	103.000.000,00	100	84.554.464,00	114.500.000,00	100	90.508.540,00	128.550.000,00	100	92.402.984,00	142.205.000,00	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	45.206.000,00	3	45.540.688,00	50.000.000,00	3	46.304.532,00	55.000.000,00	3	48.880.052,00	60.500.000,00	3	49.938.184,00	64.550.000,00	3	50.799.257,00	73.205.000,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	31.914.000,00	2	32.000.000,00	38.000.000,00	2	33.600.000,00	40.000.000,00	2	34.000.000,00	44.000.000,00	2	35.800.000,00	50.000.000,00	2	36.200.000,00	55.000.000,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
7	01	03	2.03	0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25	3.346.400,00	25	3.363.551,00	6.000.000,00	25	3.463.306,00	8.000.000,00	25	3.674.412,00	10.000.000,00	25	4.770.356,00	12.000.000,00	25	5.403.727,00	14.000.000,00	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	42.444.400,00	100	42.663.948,00	45.000.000,00	100	43.929.261,00	50.000.000,00	100	45.542.404,00	55.000.000,00	100	47.823.946,00	60.500.000,00	100	49.283.952,00	66.550.000,00	
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	42.444.400,00	100	42.663.948,00	45.000.000,00	100	43.929.261,00	50.000.000,00	100	45.542.404,00	55.000.000,00	100	47.823.946,00	60.500.000,00	100	49.283.952,00	66.550.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	42.444.400,00	12	42.663.948,00	45.000.000,00	12	43.929.261,00	50.000.000,00	12	45.542.404,00	55.000.000,00	12	47.823.946,00	60.500.000,00	12	49.283.952,00	66.550.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	3.344.400,00	100	3.363.551,00	6.000.000,00	100	3.463.306,00	8.000.000,00	100	3.590.484,00	10.000.000,00	100	3.770.356,00	12.000.000,00	100	3.885.461,00	14.000.000,00	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemusatan Kepala Daerah	100	3.344.400,00	100	3.363.551,00	6.000.000,00	100	3.463.306,00	8.000.000,00	100	3.590.484,00	10.000.000,00	100	3.770.356,00	12.000.000,00	100	3.885.461,00	14.000.000,00	
7	01	05	2.01	0002	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25	3.346.400,00	25	3.363.551,00	6.000.000,00	25	3.463.306,00	8.000.000,00	25	3.590.484,00	10.000.000,00	25	3.770.356,00	12.000.000,00	25	3.885.461,00	14.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	3.344.400,00	100	3.363.551,00	3.681.040,00	100	3.463.306,00	8.000.000,00	100	3.590.484,00	10.000.000,00	100	3.770.356,00	12.000.000,00	100	3.885.461,00	14.000.000,00	
7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	3.344.400,00	100	3.363.551,00	3.681.040,00	100	3.463.306,00	8.000.000,00	100	3.590.484,00	10.000.000,00	100	3.770.356,00	12.000.000,00	100	3.885.461,00	14.000.000,00	
7	01	06	2.01	003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25	3.346.400,00	25	3.363.551,00	3.681.040,00	25	3.463.306,00	8.000.000,00	25	3.590.484,00	10.000.000,00	25	3.770.356,00	12.000.000,00	25	3.885.461,00	14.000.000,00	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7	01	06	2.01	006	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																	
				Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	25		25			25			25			25			25			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2025

Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
epada masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan akuntabilitas.

No.	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)						
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						7	8	9	2	10	11	12	13	14=10+11+12+13		15=14/9x100		16= 8*14		17= 16/7x100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	10	11	12	13	14=10+11+12+13		15=14/9x100		16= 8*14		17= 16/7x100								
			Urusur Kewilayahan																									
			Kecamatan Balongpanggang			4.452.728.684,00	4.117.514.619,69	4.871.430.390,41	4.354.017.204,70	939.768.083,99	1.000.217.857,68	810.499.728,00	991.152.788,00	3.741.638.457,67		85,94	85,94	7.440.998.267,36										
1	7.1.01	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		4.174.329.684,00	3.865.781.509,69	4.710.657.290,41	4.106.740.704,70	939.768.083,99	981.865.057,68	765.325.378,00	852.085.388,00	3.539.043.907,67		86,18	86,18	-	7.404.825.417,36	#DIV/0!	177,39							
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Laporan	7	4.200.000,00	5	3.748.094,00	2.970.000,00	1.680.000,00	0	-	32	960.000,00	24	720.000,00	-	-	57	1.680.000,00	100,00	56,57	62	5.428.094,00	879,51	129,24	
	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	700.000,00	5	700.000,00	5	495.000,00	280.000,00	0	-	280.000,00				5	280.000,00	100,00	56,57	10	980.000,00	200,00	140,00		
	7.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	5	700.000,00	0	320.000,00	5	495.000,00	280.000,00		-	280.000,00					280.000,00	100,00	56,57	-	600.000,00	-	85,71		
	7.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	5	700.000,00	0	699.794,00	5	495.000,00	280.000,00		-	280.000,00					280.000,00	100,00	56,57	-	979.794,00	-	139,97		
	7.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	5	700.000,00	0	668.400,00	5	495.000,00	280.000,00		-	120.000,00		160.000,00			280.000,00	100,00	56,57	-	948.400,00	-	135,49		
	7.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	5	700.000,00	0	691.500,00	5	495.000,00	280.000,00		-	280.000,00					280.000,00	100,00	56,57	-	971.500,00	-	138,79		
	7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	700.000,00	0	668.400,00	5	495.000,00	280.000,00		-	280.000,00					280.000,00	100,00	56,57	-	948.400,00	-	135,49		
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja administrasi	Kegiatan	2	3.607.499.584,00		3.340.027.842,69	2	4.191.513.889,41	3.615.009.555,39	22	901.361.803,99	26	883.049.145,68	16	651.912.865,00	16	670.224.005,00	79	3.106.547.819,67	85,93	85,93	79	6.446.575.662,36	#####	178,70
	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Solusi yang Meringkas Gaji	Orang	30	3.606.824.584,00	30,00	3.339.353.042,69	30	4.190.893.889,41	3.614.564.555,39	30	901.361.803,99		882.604.145,68		651.912.865,00		670.224.005,00		3.106.102.819,67	85,93	74,12	30	6.445.455.862,36	100,00	178,70
	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	5	675.000,00	5	674.800,00	5	620.000,00	445.000,00	0	-	445.000,00					445.000,00	100,00	71,77	5	1.119.800,00	100,00	165,90		
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah realisasi terhadap Pelaksanaan	Rekening	5	152.298.900,00	5	139.234.500,00	5	110.354.001,00	87.351.249,31	0	-	11	11.804.000,00	13	14.873.000,00	51	55.953.595,00	75	82.630.595,00	94,60	94,60	80	221.865.095,00	#####	159,36
	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	10	42.093.600,00	10	25.635.000,00	10	17.460.100,00	15.990.700,00	0	-	3.350.000,00		2.813.600,00		9.795.995,00		15.959.595,00	99,81	91,41	10	41.594.595,00	100,00	98,81	
	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	2	45.000.000,00	7	28.960.000,00	1500	24.990.000,00	30.015.000,00	0	-	2.580.000,00		900.000,00		26.524.500,00		30.004.500,00	99,97	120,07	7	58.964.500,00	350,00	131,03	
	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	5	5.677.300,00	5	12.065.500,00	3	7.697.301,00	4.129.049,31	0	-	584.000,00		793.600,00		2.751.300,00		4.128.900,00	100,00	53,64	5	16.194.400,00	100,00	285,25	
	7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	5	23.000.000,00	5	9.745.000,00	2	8.324.100,00	8.324.100,00	0	-	330.000,00		6.595.800,00		450.000,00		7.375.800,00	88,61	88,61	5	17.120.800,00	100,00	74,44	
	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	230	36.528.000,00	12	40.746.000,00	222	38.830.000,00	17.330.000,00	0	-	4.960.000,00		3.770.000,00		4.910.000,00		13.640.000,00	78,71	35,13	12	54.386.000,00	5,22	148,89	
	7.01.01.2.06.0011		Kelembagaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	Dokumen	10	26.669.000,00		22.083.000,00	10	13.052.500,00	11.562.400,00		-	-		11.521.800,00				11.521.800,00	99,65	88,27		33.604.800,00			
	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Solusi realisasi terhadap Pelaksanaan Tugas	Jenis	3	315.011.200,00	3	300.869.388,00	3	325.734.000,00	322.614.500,00	12	38.406.280,00	24	77.031.912,00	25	82.579.513,00	22	71.994.588,00	83	270.012.293,00	83,70	83,70	86	570.881.681,00	#####	181,23
	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	Laporan	3	89.011.200,00	3	63.447.908,00	3	85.453.200,00	85.453.200,00	3			19.422.492,00		18.570.093,00		14.284.628,00		52.277.213,00	61,18	61,18	3	115.725.121,00	100,00	130,01
	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	2	10.000.000,00	4	10.000.000,00	3	9.784.800,00	6.665.300,00	0	-			6.400.000,00				6.400.000,00	96,02	65,41	4	16.400.000,00	200,00	164,00	
	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	7	216.000.000,00	6	227.421.480,00	8	230.496.000,00	230.496.000,00	8	38.406.280,00		57.609.420,00		57.609.420,00		57.709.960,00		211.335.080,00	91,69	91,69	6	438.756.560,00	85,71	203,13
	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah realisasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Jenis	3	95.320.000,00	3	81.901.685,00	3	80.085.400,00	80.085.400,00	0	-	11	9.020.000,00	19	15.240.000,00	67	53.913.200,00	98	78.173.200,00	97,61	97,61	101	160.074.885,00	#####	167,93
	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	3	69.580.000,00	3	71.112.485,00	3	70.385.400,00	70.385.400,00	3			7.800.000,00		14.640.000,00		46.033.200,00		68.473.200,00	97,28	97,28	3	139.585.685,00	100,00	200,61

	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	5	13.800.000,00	1	4.089.200,00	5	3.000.000,00	3.000.000,00	0	-		600.000,00		2.400.000,00		3.000.000,00	100,00	100,00	1	7.089.200,00	20,00	51,37		
	7.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Unit	60	11.940.000,00	11	6.700.000,00	60	6.700.000,00	6.700.000,00	0	-	1.220.000,00		5.480.000,00	6.700.000,00	100,00	100,00	11	13.400.000,00	18,33	112,23				
Rata - rata capaian kinerja (%)																					92,37							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi							
2	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik			25.000.000,00	80	23.837.500,00		15.571.100,00	12.371.100,00		-	3.200.000,00		6.335.350,00		2.800.000,00		12.335.350,00	79,22	79,22		36.172.850,00			
	7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		2	25.000.000,00	80	23.837.500,00	2	15.571.100,00	12.371.100,00	0	-	21	3.200.000,00	41	6.335.350,00	18	2.800.000,00	79	12.335.350,00	79,22	79,22	159	36.172.850,00	#####	144,69
	7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan	Laporan	2	24.914.000,00	2	23.837.500,00	2	15.571.100,00	12.371.100,00	0		3.200.000,00		6.335.350,00		2.800.000,00		12.335.350,00	99,71	79,22	2	36.172.850,00	100,00	145,19	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					79,22							
Predikat Kinerja																					Tinggi							
3	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat			157.895.000,00	25	163.631.560,00		96.062.800,00	108.220.200,00		-	4.352.800,00		28.039.000,00		52.258.200,00		84.650.000,00	78,22	78,22					
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan	Desa	25	38.501.200,00	25	19.160.000,00	25	15.596.400,00	29.546.400,00	0	-	15	2.296.400,00	0	-	##	18.700.000,00	135	20.996.400,00	71,06	71,06	160	40.156.400,00	638,49	104,30
	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	Lembaga Kemasyarakatan	25	38.501.200,00	25	19.160.000,00	25	15.596.400,00	29.546.400,00	0		2.296.400,00		18.700.000,00		20.996.400,00		71,06	134,62	25	40.156.400,00	100,00	104,30		
	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		2	119.393.800,00	25	144.471.560,00		80.466.400,00	78.673.800,00	0	-	3	2.056.400,00	35	28.039.000,00	42	33.558.200,00	79	63.653.600,00	80,91	80,91	104	208.125.160,00	#####	174,32
	7.01.03.2.03.0001		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga Kemasyarakatan	2	41.695.900,00	2	84.877.500,00	3	45.206.000,00	31.697.400,00	0			20.439.000,00		11.203.200,00		31.642.200,00	99,83	70,00	2	116.519.700,00	100,00	279,45		
	7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga Kemasyarakatan	1	52.897.900,00	25	52.440.515,00	2	31.914.000,00	19.940.000,00	0			7.600.000,00		8.755.000,00		16.355.000,00	82,02	51,25	25	68.795.515,00	#####	130,05		
	7.01.03.2.03.0004		Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Facilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	Laporan	25	24.800.000,00	25	7.153.545,00	25	3.346.400,00	27.036.400,00	0		2.056.400,00		13.600.000,00		15.656.400,00		57,91	467,86	25	22.809.945,00	100,00	91,98		
Rata - rata capaian kinerja (%)																					75,99							
Predikat Kinerja																					Tinggi							
4	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Laporan		49.828.000,00		48.123.000,00		42.446.400,00	68.046.400,00		-	10.800.000,00		10.800.000,00		43.136.400,00		64.736.400,00	95,14	95,14					
	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penegakan Konflik	Laporan	12	49.828.000,00	80	48.123.000,00		42.446.400,00	68.046.400,00	0	-	25	10.800.000,00	25	10.800.000,00	##	43.136.400,00	153	64.736.400,00	95,14	95,14	233	112.859.400,00	#####	226,50
	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	49.828.000,00	1	48.123.000,00	12	42.446.400,00	68.046.400,00	0		10.800.000,00		10.800.000,00		43.136.400,00		64.736.400,00	95,14	152,51	1	112.859.400,00	8,33	226,50	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					95,14							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi							
5	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi			33.219.000,00		8.679.650,00		3.346.400,00	32.852.400,00		-	-	-	20.836.400,00	-	20.836.400,00		63,42	63,42						
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Kepala Daerah		25	33.219.000,00	80	8.679.650,00		3.346.400,00	32.852.400,00		-	-	-	20.836.400,00	-	20.836.400,00		63,42	63,42	80	29.516.050,00	320,00	88,85		
	7.01.05.2.01.0002		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek)	Orang	25	33.219.000,00	25	8.679.650,00	25	3.346.400,00	32.852.400,00	0				20.836.400,00		20.836.400,00		63,42	622,65	25	29.516.050,00	100,00	88,85		
Rata - rata capaian kinerja (%)																					63,42							
Predikat Kinerja																					Rendah							
6	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		25	12.457.000,00	25	7.461.400,00	25	3.346.400,00	25.786.400,00		-	0	-	0	-	##	20.036.400,00	599	20.036.400,00	77,70	77,70				

7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi dan rekomendasi Pemerintah Desa	Desa	25	12.457.000,00	25	7.461.400,00	25	3.346.400,00	25.786.400,00	0	-	0	-	0	-	##	20.036.400,00	599	20.036.400,00	77,70	77,70	624	27.497.800,00	#####	220,74	
7.01.06.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	Dokumen	2	12.457.000,00	2	7.461.400,00	25	3.346.400,00	25.786.400,00	0							20.036.400,00		20.036.400,00	77,70	598,74	2	27.497.800,00	100,00	220,74	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.871.430.390,41	4.354.017.204,70		939.768.083,99		1.000.217.857,68		810.499.728,00		991.152.788,00		3.741.638.457,67							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																							79,98	79,98			2.839	161
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGAM																							Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD tahun berikutnya :																												

No.	KRITERIA PENILAIAN	REALISASI
1	ST	81% ≤ 100%
2	T	76% ≤ 90%
3	S	66% ≤ 75%
4	R	51% ≤ 65%
5	SR	≤ 50%

Disusun
Balongpanggang, Januari 2026
KABUPATEN BALONGPANGGANG



MERISTADEDY HARTADI, S.STP., M.Si
NIP. 19800507 200012 1 001

Disetujui
Gresik, Januari 2026

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN GRESIK